



LAPORAN PENELITIAN

**“ AKSI RADIKALISME MASSA DI BUARAN PEKALONGAN :
MENCARI AKAR PERSOALAN KERUSUHAN POLITIK DI
BUARAN PEKALONGAN 26 DAN 27 MARET 1997 “**

Oleh :
Nur Hidayat, S.Sos, dkk.

Dibiayai oleh Dana Rutin Universitas Diponegoro
Sesuai Perjanjian Pelaksanaan Penelitian tanggal 25 Agustus 1998
Nomor : 3908/PT09.112/N/1998

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1999**

Handwritten:
No. 415064 - Semarang

LAPORAN HASIL AKHIR PENELITIAN

1. Judul Penelitian : "AKSI RADIKALISME MASSA DI BUARAN PEKALONGAN : Mencari Akar Persoalan Kerusuhan Politik di Buaran Pekalongan 26 dan 27 Maret 1997"
2. Bidang Penelitian : Sosial
3. Kategori Penelitian : Pengembangan untuk Pembangunan.
4. Ketua Peneliti :
- a. Nama : Nur Hidayat, S.Sos.
- b. NIP : 132 173 215
- c. Pangkat / golongan : Penata Muda / III-a
- d. Jabatan : Asisten Ahli Madya
5. Jumlah Anggota : 4 (empat) orang
6. Lokasi Penelitian : Kodya Pekalongan
7. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) bulan
8. Dibiayai melalui : DIK Rutin Undip 1998/1999
9. Biaya Yang diperlukan : Rp 3.000.000,00
(tiga juta rupiah)-

Semarang, 15 Februari 1999.

Ketua Tim Peneliti,

Nur Hidayat, S.Sos.
NIP. 132 173 215



DAFTAR NAMA TIM PENELITIAN

- Ketua Tim** : **Nur Hidayat, S.Sos.**
NIP. 132 173 215
- Anggota** : **1. Drs. Ahmad Taufiq, M.Si**
NIP. 131 631 484
- 2. Dra. Wiwik Widayati, M.Si.**
NIP. 131 610 349
- 3. Dra. Puji Astuti, M.Si.**
NIP. 131 672 467
- 4. Drs. Yuwanto, M.Si.**
NIP. 131 764 036

RINGKASAN

AKSI RADIKALISME MASSA DI BUARAN PEKALONGAN : Mencari Akar Persoalan Kerusuhan Politik di Buaran Pekalongan 26 dan 27 Maret 1997.

(Nur Hidayat, Ahmad Taufiq, Wiwik Widayati, Puji Astuti, Yuwanto : 1999, 60 halaman)

Kerusuhan massa yang terjadi di Buaran Pekalongan pada tanggal 26 dan 27 Maret 1997 memang berdimensi politik. Peristiwanya bermula dari massa yang marah dan kemudian merusak panggung untuk acara "Nada dan Dakwah" yang diselenggarakan oleh DPD II Golkar Kodya Pekalongan. Kerusuhan bermula di kompleks pondok pesantren al-Qur'an namun kemudian menjadi aksi radikalisasi massa yang menghancurkan seluruh kota Buaran Pekalongan.

Latar belakang kerusuhan ternyata tidak cukup bisa dijelaskan dari persoalan politik semata-mata ; oleh karena ternyata ia bersangkutan paut dengan persoalan-persoalan ketidakadilan ekonomi, sosial budaya, karakter komunitas Buaran yang cenderung kokoh dalam memegang nilai-nilai agamanya dengan menempatkan struktur kepemimpinan yang monolitik di tangan figur kyai dan ulama, serta pula secara aspek kesejarahan kota Pekalongan yang sarat dengan antitesis terhadap para penguasanya.

Penelitian ini melibatkan 20 (dua puluh) informan yang terjaring dengan menggunakan prinsip dan metode pengumpulan *snow ball* yang dipilih berdasarkan kompetensi dalam persoalan kerusuhan ; serta dengan menggunakan analisis induktif kuantitatif guna menangkap akurasi data primer dan data sekunder.

SUMMARY

This research entitles **SOCIAL PANDEMONIUM IN BUARAN, PEKALONGAN: AN EFFORT TO ENCOUNTER PRINCIPAL CAUSES OF POLITICAL CHAOS IN BUARAN, PEKALONGAN MUNICIPALITY DURING MARCH 26 AND 27, 1997.**

Social chaos eventuated in Buaran, Pekalongan Municipality, during March 26 and 27 1997 has given far-reaching consequences. Not only it has damaged public facilities but also it has brought people to a conclusion that the aforementioned social chaos possessed a deeply political motive. Chronologically, The riot started because of a group of anger people demolitionizing a scaffold prepared for a musical event, the so-called *nada dan dakwah* where *Pondok Pesantren Al-Qur'an* is situated. Within few hours intervening, the riot spread across Buaran, Pekalongan.

Having conducted an academically-proven research, We concluded that the political motive does not make up the axial principle; in fact, profoundly economic fairless, multicultural society, and religious society that hold their faith according to the religious values thought by aspiring and monolithic spiritual leaders, the so-called *kyai* and *ulama*, also triggered the amok to happen. Further more, we also analyzed that the municipality's historical background in which the society always negatively respond to any government's policy.

To execute the research, we involved 20 tried and true respondents selectively picked based on the method of *snow ball*. In addition, We also make use of the inductive-quantitative analysis so that primary and secondary data can be obtained.

KATA PENGANTAR

Kerusuhan yang terjadi di Buaran Pekalongan pada tanggal 26 dan 27 Maret 1997 di Pekalongan itu, menurut dugaan para peneliti sejak awal ketika merumuskan usulan penelitian ini, memang disebabkan tidak sekadar persoalan politik ; namun lebih dari itu ia berdimensi lebih luas, seperti sosial ekonomi, religiusitas orang Buaran karena struktur kepemimpinannya, dan seterusnya. Kami sepakat ada sesuatu latar belakang di balik kejadian-kejadian dimaksud mengingat bahwa kerusuhan yang terjadi itu bukan sekali ini terjadi, namun ia sudah mensiklus lima tahunan. Padahal setiap kerusuhan tentu menyisakan persoalan-persoalan lebih jauh lagi. Oleh karena itu kami sepakat untuk menyusunnya dalam bentuk proposal, yang kebetulan saja tiba waktu untuk mengisi kesempatan lewat pendanaan yang ada, yakni Dana Rutin Undip anggaran 1998/1999.

Tentu saja penelitian ini tiada berjalan tanpa bantuan berbagai pihak, terutama kepada :

1. Rektor Undip dan PR I Undip ;
2. Dekan Fisip Undip ;
3. Pengurus cabang PPP kodya Pekalongan ;
4. Para kyai, sesepuh, dan tokoh masyarakat Pekalongan dan tokoh bisnis di Pekalongan khususnya Buaran ;
5. Serta pihak-pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatunya.

Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih.

Meskipun dengan dana yang sesungguhnya kurang dari memadai, penelitian ini telah diusahakan semaksimal mungkin agar dapat menjawab segala persoalan yang terjadi di Buaran Pekakongan. Namun tetap saja kekurangan kami menghalangi sehingga karya ini masih banyak celah-celah untuk tidak dikatakan sempurna. Untuk itu saran, kritik, dan sumbangsih pemikiran Anda amat kami harapkan.

Terima kasih.

Semarang, Maret 1999.
Ketua Tim Peneliti,

Nur Hidayat Sardini
NIP. 132 173 215

DAFTAR ISI

Lembar Identitas dan Pengesahan	i
Daftar Nama Peneliti	ii
Ringkasan dan Summary	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN UMUM WILAYAH KOTAMADYA PEKALONGAN	23
BAB III REKONSTRUKSI DAN FAKTOR PENYEBAB LANGSUNG KERUSUHAN POLITIK DI BUARAN ..	36
BAB IV LATAR BELAKANG TAK LANGSUNG KERUSUHAN POLITIK DI BUARAN PEKALONGAN	56
BAB V PENUTUP	83
DAFTAR PUSTAKA	85
DAFTAR INFORMAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Pembagian Wilayah Adimistrasi Kodya Pekalongan	26
Tabel II	: Klasifikasi Menengah Usaha Pematikan Kodya Pckalongan ...	27
Tabel III	: Jumlah Unit Usaha Pematikan Pekalongan berdasarkan Omzet	28
Tabel IV	: Keberadaan SPSI Pada Industri Pematikan	30
Tabel V	: Jumlah Penduduk WNRI Kodya Dati II Pekalongan Pada Pemilu 1997 Berdasarkan Sex Ratio	30
Tabel VI	: Jumlah Penduduk WNRI Kodya Dati II Pekalongan Berdasarkan Komposisi Usia	31
Tabel VII	: Jumlah Pemilih Yang Terdaftar Pada Pemilu 1997	31
Tabel VIII	: Jumlah Penduduk Menurut Agama	32
Tabel IX	: Jenis dan Jumlah Tempat Ibadah	32
Tabel III-1	: Perbandingan Perolehan Kursi DPRD II Pemilu 1997 / 1992	50
Tabel III-2	: Perbandingan Suara Pemilu 1997	51
Tabel III-3	: Perbandingan Suara Pemilu 1992	52
Tabel III-4	: Perolehan Suara Pemilu 1992 dan Pemilu 1997	52
Tabel III-5	: Perbandingan Perolehan Suara Pemilu 1987 / 92	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 26 Maret 1997 kota Buaran Pekalongan dilanda kerusuhan sosial (*social riot*). Kerusuhan sosial itu berkaitan dengan persoalan-persoalan politis, oleh karena itu kerusuhan ini dinamakan kerusuhan politik, yang setidaknya-tidaknya bisa dijelaskan dari dua entitas yang melatarbelakanginya.

Pertama, kejadian bermula dari pengrusakan yang dilakukan oleh sekelompok massa terhadap panggung pengajian Golkar yang rencananya akan diselenggarakan pada malam hari tanggal 26 Maret 1997, di kompleks pondok pesantren (PP) al-Qur'an K.H. Syafii. Massa yang tidak puas, yang adalah massa partai bintang, di samping merusak panggung dan segala macam peralatan perhelatan, juga mengamuk hingga mengakibatkan seluruh isi toko di kota Buaran tertumpah di jalanan sepanjang satu kilometer, termasuk fasilitas-fasilitas umum kota lainnya. Tidak luput pula, harta benda milik keturunan Tionghoa jadi sasaran amukan massa. Massa kota Buaran, yang pada Pemilu 1992 sebelumnya sebagian besar menetapkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai pilihan politiknya, tidak rela jika kompleks pondok pesantren, bersebelahan dengan masjid, madrasah ibtidaiyah islamiyah, dan selama ini dipandang sebagai kompleks "suci" bagi warga kotanya, dijadikan ajang untuk bermain-main musik dan berjoget bersama pejabat pemerintah dan Golkar.

Selain itu, pagelaran "Nada dan Dakwah" itu dianggap melecehkan warga Buaran Pekalongan yang sebagian besar afiliasi politiknya kepada PPP. Betapa tidak,

Selain itu, pagelaran “Nada dan Dakwah” itu dianggap melecehkan warga Buaran Pekalongan yang sebagian besar afiliasi politiknya kepada PPP. Betapa tidak, sejak Januari 1997, misalnya, elite partai bintang telah mengajukan izin penyelenggaraan peringatan ulang tahun ke-24 PPP yang rencananya juga akan menggelar pengajian semacam itu kepada pihak pemerintah dan aparat keamanan ; namun hingga penyelenggaraan acara Golkar itu akan digelar, perizinan belum juga keluar. Dengan demikian, kemarahan elite partai dan dengan dukungan massa Buaran, paling tidak didukung oleh elite-elite lokal yang seluruhnya memiliki konstituenasi massa, secara langsung maupun tidak langsung berada di balik kerusuhan sosial dimaksud.

Ketua Umum dan Ketua DPP Golkar H Harmoko dan Siti Hardiyanti Indra Rukmana, pejabat sipil maupun militer tingkat kodya dan kabupaten di sekitar kota Pekalongan, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Subagyo Hadisiswoyo dan Kapolda Jateng Mayjen Pol. Drs. Nugroho Djajoesman, selain juga Gubernur Jawa Tengah H. Soewardi, dai sejuta umat Zainudin MZ dan raja dangdut Rhoma Irama, yang rencananya hadir dan memeriahkan acara bertajuk “*Nada dan Dakwah*” tersebut, jadi urung karena keburu terjadi kerusuhan.

Kedua, lebih jauh bahwa kerusuhan di Buaran itu dipandang sebagai akumulasi kekecewaan politik dari warga Buaran khususnya dan Pekalongan pada umumnya. Jika dirunut lebih jauh, terdapat determinisme keputusan politik penguasa daerah Jawa Tengah sehingga menggiring warga ke arah radikalisasi politik. Pertama, politik kuningisasi. Seperti diketahui, bahwa Gubernur Jawa Tengah mengintroduksi suatu pewarnaan kuning, oleh karenanya disebut dengan

kuningisasi. pada setiap fasilitas-fasilitas umum seperti pagar rumah dinas, perkantoran pemerintah, trotoar, serta tempat-tempat umum yang dipandang strategis. Secara legal formal memang tidak ada instruksi secara tertulis kepada ke-35 kepala daerah (KDH) di Jawa Tengah untuk mengecat setiap fasilitas umum itu ; namun, dalam kadarnya yang informal apa yang diidekan oleh Gubernur Soewardi itu dianggap sebagai bentuk “loyalitas” dan bentuk “konduite” tersendiri bagi figur KDH tk. II ini untuk menuruti himbauan tersebut. Pada kenyataannya, tidak satu pun para KDH yang menentang “himbauan” itu, dan secara kasat mata sejak Gubernur mendesakkan kuningisasi, sepanjang jalan di wilayah Jawa Tengah dijumpai kenyataan kuningisasi. Seperti yang dilansir oleh berbagai media cetak dan elektronika baik nasional maupun lokal Jawa Tengah, politik kuningisasi merupakan implementasi dan konkretisasi ambisi Gubernur Soewardi untuk memenangkan Golkar di wilayah Jawa Tengah. Meskipun banyak dikritik oleh elite politik Golkar dan kalangan militer Kodam IV/Diponegor, agaknya Gubernur Soewardi tidak bergeming dari politik kuningisasi, bahkan secara gencar ia mengangkat kuningisasi sebagai isu untuk memperlihatkan kepada bawahannya bahwa itulah salah satu bentuk dari konduite “PDLT” (prestasi, dedikasi, loyalitas, dan Tak-tercela) bawahan kepada atasannya.

Seperti yang menimpa daerah lain, di wilayah Pekalongan kuningisasi menimpa tidak saja fasilitas umum sepanjang jalan, misalnya, namun juga menimpa fasilitas-fasilitas tempat ibadah terutama musholla. Hal ini mengundang ketidaksukaan para tokoh informal (kyai) lokal Buaran. Sebagai elite lokal yang konstituensinya menguasai para jamaah, yang sering diutarakannya pada setiap

majelis-majelis taklim di kampung-kampung, apa yang dikeluhkannya sudah dengan sendirinya menjadi tindakan operasional jemaahnya. Dengan demikian, keresahan kyai berdampak pada tindakan umat Muslim lokal untuk menentang kepada keputusan penguasa Jawa Tengah itu.

Di samping itu, secara teologis politik kuningisasi menemukan daya tolaknya di komunitas muslim lokal mengingat diyakininya dari sebuah hadis (?) yang menyatakan bahwa “Nabi Muhammad tidak suka warna kuning”. Lepas dari *sahih* dan *dlailf* (lemah)-nya hadis tersebut, pada tingkat realitas yang berkembang di Buaran, maka ia secara efektif fiqih menjadi alat pembenar bagi elite kyai dan massa Buaran untuk menentang kepada Golkar. Kekuatan Golkar sama artinya sebagai lambang yang harus dihancurkan. Demikianlah hari-hari pada bulan ramadhan dan Idul Fitri 1417 H. di Buaran Pekalongan suasana perlawanan terhadap penguasa terjadi ; sehingga tidak jarang upaya penentangan itu secara sporadis terjadi di tempat-tempat di mana basis *informal leader* radikal, *versus* kekuatan Pemerintah dan Golkar melakukan aksi-aksi politiknya.

Kedua, antithesis dari safari ramadhan yang digalakkan oleh para pejabat Pemerintah selama ramadhan 1417 H. Sudah lazimnya, setiap pejabat Pemda baik pucuk pimpinannya maupun pejabat terasnya melakukan “njajah deso milan kori”, sudah pasti misi-misi Golkar juga dikomunikasikan kepada jemaah sholat tarawih, sholat Jumat, dan setiap forum majelis taklim yang biasanya disertakan oleh para pejabat Golkar dan birokrasi. Di daerah Buaran, seperti juga di daerah lain, kegiatan tarawih keliling (tarling) yang dilakukan Pejabat sudah barang tentu sarat dengan pesan-pesan yang pada intinya agar mendukung dan memenangkan Golkar, yang

tidak jarang pada sela-sela acara tersebut selalu disimbolisasikan dengan sumbangan untuk pembangunan masjid, musholla, atau madrasah, dan seterusnya. Pada kenyataannya, di Buaran tidak semua kyai dan elite lokal dapat digiring untuk mendukung Golkar atau Propemerintah, justru sebagian besar masih mendukung PPP. Dengan demikian, jelas kampanye terselubung Golkar dan pejabat Pemerintah itu menimbulkan rasa iri (*geloosly*) mereka yang mendukung PPP, sehingga ini menambah ketegangan politik selama bulan dan setelah ramadhan 1417 H. di Buaran Pekalongan.

Terutama yang dipelopori oleh keempat kyai garus keras pada hari-hari lebaran menggelar forum-forum kampanye berlabel *halal bi-halal*, yang menghadirkan kyai kokal Pekalongan maupun dari daerah lainnya, tentu mereka yang seafiran politik dengannya. Menurut pengamatan penulis, bahwa keempat kyai itu adalah (1) K.H. Afifudin Musytari Hambali al-Hafidz dari PP *Holy of al-Qur'an* Mangkang Semarang ; (2) K.H. Thohir Abdullah Fatah asal desa Jenggot Pekalongan Selatan ; (3) K.H. Munawir Abdul Jabbar asal Kelurahan Krapyak Utara Pekalongan ; serta (4) K.H. Mansur dari Pemalang. Dalam setiap orasinya di depan massa yang terkadang ribuan orang, terutama yang disebut pertama, para kyai itu selalu menyitir istilah-istilah "najis", "celeng", "asu", serta dengan gampangya saling mengkatirkan kepada para kyai yang telah mendukung Golkar maupun para kyai yang bersikap netral. Kesaksian penulis pada hari ke-3 Idul Fitri 1417 H. di desa Simbang Wetan Buaran, secara sarkasme kyai Afifudin menantang cuek kepada salah satu nama kyai pengajar 'qiro (seni baca al-Qur'an) yang dianggap tidak sepaham

dengan dirinya, padahal kyai tadi berdasarkan wawancaranya dengan penulis tidak berpilih kepada partai apa pun.

Oleh karena politis, maka serangkaian kronogisnya juga bermuatan politik. Massa yang tidak puas, pada hari Rabu tanggal 26 Maret 1997 secara beringas membakar panggung yang tengah didirikan oleh panitia nada dan dakwah di kompleks pp al-Quran. Pada sore dan malam harinya, massa yang terkumpul tidak saja menghancurkan panggung itu, namun kemudian sudah menghancurkan toko-toko milik pribumi dan etnis Tionghoa sepanjang jalan Banyurip Alit dan Banyurip Ageng Buaran dan mengeluarkan semua isinya di jalanan. Karena sebagian besar toko-toko itu adalah menjual industri batik, maka jalanan berwarna-warni sesuai warna dan corak batik Pekalongan. Sebanyak 210 buah toko rusak isinya, 150 kendaraan roda dua hangus, 17 mobil rusak menjadi bangkai, kantor BRI unit Buaran, sebuah wartel, dihancurkan massa ; Sembari meneriakkan yel-yel antiGolkar, anti Soewardi, anti Roma Irama dan Zainuddi MZ, secara praktis massa menguasai kota Buaran pada tanggal 26 Maret 1997 sebelum keesokan harinya dapat direbut aparat keamanan lokal Pekalongan.

Pada hari berikutnya, massa yang lebih besar (sekitar 10 ribu-an) menguasai kota Buaran Pekalongan kembali. Kota Buaran lumpuh total. Pasukan yang ada, yakni dari polwil Pekalongan tidak dapat menguasai keadaan, oleh karena hujan batu dari kanan-kiri pasukan sepanjang jalan antara Kradenan hingga Banyurip Ageng ditimpuki bebatuan yang diarahkan dari rumah-rumah toko (ruko) yang dikuasai perusuh. Baru setelah pasukan tambahan dari Brimob Purwokerto dan pasukan dari Kodam IV/Diponegoro didatangkan, dan dikomandoni langsung oleh Mayjen TNI

Subagyo Hadisiswoyo. Upaya Pangdam tampaknya berhasil oleh karena pendekatan yang dilakukannya menyertakan para alim ulama dan tokoh PPP untuk menenangkan massa yang beringas, di samping dikemukakannya sentimentalitas ke-Islam-an oleh Pangdam sembari berkali-kali Pangdam menyatakan bahwa dirinya juga bagian dari masyarakat Pekalongan yang memahami betul oleh karena kebetulan istri Pangdam, Ny. Afifah Subagyo adalah warga Wonopringgo Pekalongan. Bahkan secara dramatis ia meminta kepada para perusuh agar mengemukakan pemenuhan tuntutan, dan sebagai jaminannya ia akan mempertaruhkan jabatannya sebagai penguasa militer di daerah Jawa Tengah dan DIY jika tidak berhasil memenuhi apa yang dituntut oleh para perusuh. Upaya Subagyo berhasil, karena kemudian massa kembali tenang. Terjadi dialog antara Pangdam dan massa, dan bahkan kemudian Pangdam dicela-elukan massa.

Benarkah bahwa peristiwa Buaran Pekalongan itu hanya dilatarbelakangi oleh perebutan pengaruh kekuasaan politik antara pendukung atau simpatisan PPP versus pendukung Golkar termasuk di dalamnya adalah aparat keamanan ? Jika ditinjau secara komprehensif tidakkah peristiwa tersebut bertali-temali dengan persoalan lain yang lebih esensial ? Katakanlah oleh karena kota Pekalongan memiliki sejarah kerusuhan yang cukup tinggi (*track records*) pada era Orde Baru (1978, 1985, 1989-90, dan 1995)¹ serta dengan studi kepustakaan pun sejarah Pekalongan adalah bentuk perlawanan rakyat terhadap rezim yang berkuasa, sehingga dengan demikian *akar persoalan* yang lebih menyangkut dimensi sejarah, sosial-budaya yang berkaitan

¹ Kelinnya kerusuhan benuansa SARA, terutama etnis China sebagai sasaran kemarahan rakyat.

dengan tipikal *buaya pesisiran*², sosial ekonomi, serta faktor religiusitas bukan mustahil menjadi variabelitas mengapa kerusuhan di Buaran Pekalongan tersebut menjadi siklus dari perlawanan rakyat terhadap penguasanya ?

Bertitik tolak demikian penelitian itu dilatarbelakangi.

B. Perumusan Masalah

Berangkat dari uraian tersebut, kiranya pertanyaan dapat diajukan sebagai berikut : “Apa sebenarnya akar persoalan kerusuhan politik yang terjadi di Buaran Pekalongan itu sehingga memperlihatkan radikalisme massa yang sedemikian akut ?”

Pertanyaan tersebut dapat dirumut dalam bagian-bagian yang lebih parsial :

1. Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi sehingga radikalisasi massa seperti yang terjadi di Buaran pada tanggal 26 dan 27 Maret 1997 itu terjadi ? ;
2. Bagaimanakah radikalisasi massa yang terjadi di Buaran tersebut bertali-temali dengan dimensi-dimensi :
 - (a), Sosial-keagamaan ; (b), sosial-budaya ; (c) Sosial-ekonomi ; serta
 - (d) Sejarah kota Pekalongan ?.

C. Tinjauan Pustaka

Sejarah pantai utara pulau Jawa merupakan contoh bagaimana sebuah mitos pembangkangan Islam terhadap birokrasi muncul. Pada waktu Pantai Utara diserahkan oleh Mataram pada tahun 1744 M., yaitu sesudah Perang Cina di Jawa,

² Budaya pesisiran digambarkan Denny Lombart dalam buku “*Nusa Jawa Silang Budaya*” sebagai “lebih kosmopolitan, demokratis, egaliter, dan bertipikal “gampang berontak” terhadap penguasanya.

segera birokrasi pantai utara dibenahi untuk mengukuhkan kekuasaan kolonial Belanda. Para Bupati pribumi tidak lagi menjadi bagian dari birokrasi Mataram, tetapi bagian dari birokrasi kolonial. Sejak itulah muncul perlawanan demi perlawanan (Kuntowijoyo, 1990 :114). Dengan penyerahan tersebut, para bupati yang semula bisa memungut upeti dari rakyat secara langsung, dengan sendirinya bisa memperkaya tanpa kontrol kolonial, maka rasa ketidakpuasan di kalangan bupati sebenarnya telah timbul.

Untuk daerah Pekalongan, sebenarnya dimulai karena perlawanan K.H. A. Rifai terhadap kolonial Belanda. Dalam Babad Kaliwungu disebutkan perlawanan dari raja kaum pencuri dan perampok pada tahun 1763. Jaka Bandung adalah anak keturunan Siyung Wanara yang berasal dari Banyumas. Ia tumbuh menjadi pencuri dengan nama Ki Bandol. Pada saat putus asa karena dikejar-kejar penduduk, ia melarikan diri dan berguru pada seorang guru kekebalan di Batang. Dari Batang ia menghimpun pencuri dan perampok, namun mengalami kegagalan oleh karena ia diperangi oleh para bupati yang berafiliasi dalam birokrasi Belanda tersebut. Kyai Rifai itu merupakan kelanjutan dari Jaka Bandung yang membuka hutan dan bergelar Raja Derap Malonana Maghribi. Tema perlawanannya Kyai Rifai yang pernah berguru kepada Kyai Asyari di Kaliwungu itu, memang, seperti tertulis oleh Kuntowijoyo (Idem : 115) belum sekuat seperti pemberontakan-pemberontakan yang terjadi kemudian. Namun jelas sejak itu tradisi pertentangan antara kaum santri dengan birokrasi, atau lebih tepatnya antara orang kecil melawan penguasa sering kali muncul.

Tema peristiwa Tiga Daerah adalah perlawanan orang-orang kecil terhadap para birokrat yang terjadi di Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, dan Batang pada tahun 1945. Anton E. Lucas, yang menulis buku *Peristiwa Tiga Daerah : Revolusi Dalam Revolusi* (*The Bambo Spear Pierces the Payung*), atau "bambu runcing menusuk payung", menunjukkan bahwa peristiwa itu disebabkan dendam orang kecil terhadap para birokrat yang pada waktu revolusi masih juga bercokol di tempatnya. Sekalipun tokoh-tokoh peristiwa itu ialah campuran Islam, sosialis dan komunis, tetapi simbol Islam sangatlah menonjol. Sebagai ganti pejabat yang digulingkan atau didaulat diangkatlah para ulama setempat, di antaranya Kyai Sathoridi Brebes dan Kyai Abu Sujai di Tegal. Jelaslah bahwa Peristiwa Tiga Daerah adalah kelanjutan dari Raja Derap dan Kyai Rifai. Jadi memang di pantai Utara Jawa pertentangan antara kaum santri *versus* kaum birokrat sangatlah tajam. Tidak aneh jika dari kalangan birokrasi muncul mitos tentang pembangkangan Islam (*Islamic disident*).

Peristiwa yang terjadi pada tanggal 26 Maret 1997 di Buaran Pekalongan pun relatif sama. Khusus peristiwa tersebut, ada tiga asumsi yang bisa dikemukakan berkaitan dengan sebab-musababnya suatu kerusuhan. *Pertama*, bahwa kerusuhan massa disebabkan kesenjangan antara si kaya dengan si miskin ; *kedua*, sebagian terjadi karena motivasi dan berkaitan dengan kepercayaan terhadap agama yang dipegang secara monofungsi, yakni demi perjuangan dan pengabdian terhadap kehidupan akhirat belaka. Dengan begitu, faktor kehidupan yang profetik dan sosial amat diabaikan ; dan *ketiga*, bahwa kerusuhan sosial itu sebagai produk dari manipulasi politik (Buchori, 1996 : 28). Meskipun tulisan tersebut ia buat sebagai

tanggapan atas peristiwa Situbondo (1996), tetapi agaknya tulisan Buchori menemukan relevansinya pada persoalan kerusuhan di Pekalongan.

Lebih lanjut menurut Buchori bahwa perilaku destruktif secara kolektif yang berujung pada taraf paling dasar adalah suatu akibat sampingan dari dua kondisi budaya yang eksis pada masyarakat kita. *Pertama*, desakan yang cenderung menabakan konflik namun bersamaan dengan itu tiadanya secara substansial untuk mengakui pluralisme masyarakat yang sesungguhnya natural adanya ; *kedua*, disebabkan oleh ketidakmampuan dalam mengatasi dan menjaga keberadaan norma dan tata susila. Dalam proposisinya, Buchori sebenarnya ingin mengatakan bahwa kemampuan penguasa dalam manajemen konflik hanya difandasi sekadar sebagai pengabdian dan pelestarian *status quo* belaka, dan bukannya demi menjaga keseimbangan yang secara natural terjadinya prosesi alamiah dalam hukum seleksi alam.

Oleh karena disadari atau tidak sebuah kerusuhan apalagi bernuansa politik menyiratkan satu hal pokok yang amat mendasar bahwa rakyat atau massa suatu komunikasi politik menginginkan suara mereka didengar. Bentuk dialog yang dipaksakan berjalan sehingga kebekuan komunikasi politik tidak terjadi terus-menerus, tentunya dengan akibat buruk terhadap masyarakat yang terpimpin. Dalam hal ini M.T. Arifin mengatakan suatu hal yang perlu dikaji bahwa amuk massa sebagai pintu masuk pertumbuhan radikalisme politik, merupakan gejala yang mencerminkan proses kultural (Arifin, 1997). Sebuah kerusuhan politik adalah bentuk-bentuk protes yang menginginkan disampaikan secara terbuka. Dengan begitu, suatu usaha secara simbolis yang dikedepankan terutama oleh kelompok yang

dikalahkan secara legal dalam hubungan kekuasaan yang minimal dari semua jenis akses kehidupan yang semestinya terbagi secara merata dan berkeadilan.

Mengenai protes sebagai cerminan radikalisi massa ini, Eisenstadt mengungkapkan ada beberapa jenis tema protes yang berkembang dalam masyarakat. Ia sendiri mengungkapkan tentang definisi dari protes :

“...mengungkapkan ketegangan antara kompleksitas dan fragmentasi hubungan manusia yang inherent dalam pembagian kerja kelembagaan dan kemungkinan totalitas tidak terkondisi, serta kesenjangan partisipasi tatanan sosial dan kebudayaan” (Eisenstadt, 1986 : 54).

Selanjutnya ia membagi protes dalam beberapa karakteristik pokok yang dapat timbul pada masyarakat. *Pertama*, tema protes yang mengalami perluasan tentang pembatasan pembagian kerja dan substitusinya dengan komunitas yang ideal, yang langsung dan tanpa kesenjangan partisipasi ; *kedua*, tema protes mencakup ketegangan yang melekat (*inherent*) dalam dimensi temporal kondisi sosial dan manusinya—kepuasan khusus, langsung, dan tertunda. Protes itu lebih banyak difokuskan pada pola-pola pemuasan dan alokasi ganjaran yang mencoba memufakatkan spontanitas dan disiplin serta untuk mengatasi ketegangan antar diri dan lingkungan sosial. Pada tema ini termasuk di antaranya ialah persoalan produksi dan distribusi, sehingga lebih mengarah pada perasaan ketidakpuasan dalam bidang ekonomi. *Ketiga*, masih menurut Eisenstadt, protes memuat realitas kehidupan kelembagaan yang diarahkan pada penciptaan sebuah tatanan kemasyarakatan yang lebih berkeadilan dan kesamarataan, yakni dengan upayanya mengurangi ketidakmerataan distribusi kekuasaan.

Dari pemikiran tersebut, protes dapat didefinisikan sebagai suatu gejolak sosial yang timbul dan termanifestasi dalam tema-tema protes yang didesakkan

dalam suatu kelompok sosial. Kategori ini terentang dari persoalan atribut-atribut seseorang dalam suatu komunitas sosial, rincian keanggotaan seseorang pada sebuah kolektivitas, sehingga pada distribusi kekuasaan lingkungan masyarakat memiliki beragam variasi perbedaan. Itu artinya bahwa kerusuhan sebagai protes kultural bisa jadi menyiratkan tiga hal pokok yang ingi disampaikan seperti yang ditulis di atas.

Secara sosiologis postulasi itu lebih diperkuat dengan pemakaian lambang-lambang keagamaan jelas memiliki muatan yang semakin serius pula. Barangkali demikian yang sempat dan terus terjadi dalam kerusuhan di Buaran Pekalongan, menjadikan kegegangan dan konflik sebagai bagian dari akar kultural yang sulit untuk dihilangkan. Oleh karenanya analisis Eisenstadt (1986 : 50-51) menemukan relevansinya di Buaran, *pertama*, setiap tatanan melibatkan keberagaman para pelakunya baik individu maupun kolektif kerap kali berbeda dan berselisih mengenai pengawasan sumber-sumber alami masyarakat ; *kedua*, potensi ketegangan dan konflik lebih dimungkinkan untuk meletus cenderung ke masalah sistematis ; *ketiga*, ketegangan (dan juga kontradiksi) disebabkan perbedaan prinsip struktural yang berasal dari berbagai kode simbolis untuk dijadikan perbedaan pangkal tolak bagi penyusunan aturan dasar dalam interaksi sosial.

Pada sebab ketiga itu, penggunaan simbol interaksi akan banyak didasarkan pada kebenaran nilai yang dibawanya, dalam mana kebenaran tersebut lebih membedakan dengan perilaku massa. Pertemuan berbagai simbol yang dipaksakan jelas bukan suatu kondisi yang mengenakan dan selalu cenderung berujung pada konflik.

Keempat, karena keterbukaan relatif setiap perangkat prinsip-prinsip struktural dalam hubungannya satu sama lain dalam proses pelebagaan. Dalam hal ini kekuatan mayoritas dalam hegemoni kekuasaan cenderung melakukan kegiatan secara terbuka dan terang-terangan oleh karena, dalam kasus Buaran terdapat asumsi yang melembaga, yakni kepentingan Golkar dilindungi oleh birokrasi dan aparat militer. Sedangkan pada sisi lain, di tingkat lokal, pada *locus* yang kecil antitesis secara lugas akan didesakkan. Misalnya, dengan menolak tokoh-tokoh yang tidak sepaham, meskipun proyek kerja tidak secara eksplisit menunjukkan perbedaan ; dan *kelima*, bahwa pembuatan aturan dasar interaksi sosial melibatkan seleksi beberapa orang saja yang berlawanan dengan tanpa melibatkan partisipasi dari kelompok di luar pemegang pengaruh pemerintah.

Secara sederhana postulasi Eisenstadt dapat dijelaskan bahwa konflik yang terjadi disebabkan oleh karena setiap institusionalisasi pengaturan dalam pola-pola hubungan masyarakat didasarkan pada seleksi yang parsial, dan sebaliknya dengan menonjolkan kekuatan tertentu saja yang kebetulan berada pada lingkaran elite politik ; sehingga dengan sendirinya meminimalisasi keterlibatan atas anasir lain. Pada langkah berikutnya ketegangan seperti dijelaskan Eisenstadt di muaka akan menjadi faktor pertama yang menjadi potensi timbulnya kekerasan massal (Sarwono, *Republika* 29/1/1997).

Dalam tafsiran Duverger, kekerasan ialah salah satu cara perjuangan melawan rezim dengan mengambil dalam dua bentuk tergantung dari apakah ia hanya memperhatikan tujuan atau cara yang harus dipergunakan dalam mencapai tujuannya.

Selanjutnya, ia katakan :

"...seseorang harus menolak aturan permainan rezim yang berkuasa, dan melawannya dengan kekerasan dan aksi-aksi ilegal, atau pada pihak lain, seseorang bisa mengikuti aturan yang dibuat untuk menjatuhkan tatanan".

Sejalan dengan pendapat Arifin, di sini Duverger mengungkapkan bahwa kekerasan massa seperti kerusuhan politik adalah suatu bentuk perlawanan dalam suatu ungkapan eufemistis, dengan pernyataan ketidaksetujuan yang vulgar dan terus terang.

Dalam konstataasi lain, Dahrendorf mengungkapkan kategorisasi masyarakat dalam dua stratum besar : masyarakat atas dan masyarakat bawah. Menurut teori pertentangannya, ada kepastian kelompok-kelompok dominan dalam masyarakat yang menyatakan kepuasan terhadap kondisi yang ada, dengan membayangkan kondisi yang ada itu sebagai sesuatu yang teratur dan masuk akal, di pihak lain, kelompok yang ditundukkan cenderung memberi tekanan pada pertikaian masyarakat (Dahrendorf, 1986 : 355-356). Kecenderungan polarisasi ini akan mempermudah kita temukan pada saat masyarakat terkotak-kotak dalam sentimen kepartaian menjelang Pemilu. Aktor yang duduk sebagai elite-Golkar mengelompokkan pada sisi yang pertama ; sedangkan di luar itu secara mudah pun akan memposisikan diri dari pihak yang kedua. Di sinilah sebuah konflik kepentingan dan pergesekan yang tajam akan terbentuk.

Kecenderungan seperti di atas, memunculkan unsur ideologis dalam model masyarakat yang kita bedakan dalam bentuk yang berbeda (Dahrendorf, 1986 : 356-357). Dua model itu adalah : *pertama*, model integrasi, yakni bayangan hirarkis tentang masyarakat memberikan kemungkinan bagi dirinya sendiri dalam bertindak

mengatasnamakan suatu ideologi. Dengan demikian, ideologi berfungsi sebagai memuaskan dan yang mengawetkan *status quo* ; *kedua*, model disintegrasi, ia menggunakan kekuasaan dalam memberikan gambaran tentang ketidakpuasan dan hasrat untuk mengadakan perubahan *status quo*. Kedua model ini yang memunculkan pengertian *kelompok mereka* dan *kelompok kita*. Dalam pengertian: ekstrim, tipikal siapa musuh dan siapa kawan menemukan pertautan untuk saling menyerang. Secara teoritis masyarakat Buaran terbelah dalam dua model tersebut : pihak yang *pro-status quo* versus mereka yang *antistatus quo*. Eisenstadt mengatakan bahwa kecenderungan struktural dan ideologis demikian akan bersama-sama menciptakan simbolisme protes sebagai komponen dasar dari peradaban modern. Radikalisme politik karenanya menjadi bagian yang penting dari proses politik modern (Eisenstadt, 1986 : 226). Dengan begitu, gerakan sosial atau lebih tepatnya radikalisasi menjadi pilihan yang paling mungkin bagi masyarakat Buaran yang terkekang tersebut dalam upayanya untuk mengartikulasikan tuntutan-tuntutan politiknya.

Melihat orientasinya, Eisenstadt membagi gerakan sosial menjadi beberapa tipe. *Pertama*, gerakan yang bertujuan umum dan tidak mewakili kepentingan umum tertentu kecuali diterapkannya prinsip keadilan yang lebih luas ; *kedua*, ialah gerakan sosial yang berorientasi pada pembaharuan pranata-pranata politik ; dan *ketiga*, ialah gerakan ideologis, yang totalitas gerakan mengarah pada perubahan struktur masyarakat dan pemerintahan yang benar-benar baru.

Dalam hubungan kekerasan massa, Hoffer mengatakan bahwa aksi adalah justru menjadi unsur pemersatu (Hoffer, 1993 : 119-121). Konflik kepentingan yang

mereka cari tidak saja bertujuan menundukkan musuh, tetapi juga menumbuhkan rasa kebersamaan sehingga lebih mudah menyatukan keinginan mereka pada suatu cita-cita yang lebih besar dan tinggi. Dalam pandangannya, tindakan kekerasan dan radikalisme politik menjadi cara paling populer dalam suatu gerakan sosial yang terhambat dan sempit ruang hidupnya. Terlebih bila terdapat momentum yang memberikan alasan pembenaran terhadap gejala-gejala radikalisme sebagai tingkatan menghasilkan sumber-sumber bebas yang tinggi, lingkup pasar luas, artikulasi simbolis yang lebih luas dari bidang kelembagaan utama dan konsepsi sosial dan politik alternatif, dan oleh karenanya kecenderungan ke arah transformasi sosial terpadu (Eisenstadt, 1986 : 186). Pada bagian lain, ia uraikan betapa tingginya derajat artikulasi perjuangan politik serta pembentukan simbol dan ideologis, baik dalam protes, perjuangan politik, maupun tingginya derajat keterpaduan perubahan dan penataan kembali rezim-rezim politik dan komponen-komponen tatanan masyarakat makro lainnya (*Idem* : 180-186).

Pada kasus kerusuhan politik yang semakin menemukan penguatan artikulasi, pendalaman, ekstensifikasi, pengentalan aktivitasnya dapat dikatakan sebagai proses yang radikal. Oleh karena itu jika dicermati semakin tingginya kualitas aksi kerusuhan massa berbanding lurus dengan radikalisme atau aktivitas yang mengalami radikalisasi. Karena tampak suatu struktur aktivitas yang menunjukkan gejala yang sama, maka tergarai Eisenstadt pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya menelaah pola-pola transformasi masyarakat tradisional di Eropa yang mengarah pada revolusi.

Dengan demikian, jelaslah bahwa aksi radikalisme massa adalah suatu proses yang berbau dalam suatu tatanan masyarakat yang mengalami perubahan-perubahan sosial, sehingga kerusuhan dapat disebut sebagai suatu cara yang menunjukkan bahwa perubahan harus terjadi dan memang sedang terjadi, setidaknya pada tingkatan yang paling rendah dan minimal.

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab setiap persoalan yang berkaitan dengan lingkup kerusuhan di Buaran Pekalongan pada tanggal 26 Maret 1997 perihal:

1. Mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi sehingga radikalisasi massa di Buaran Pekalongan pada tanggal 26 s.d. 27 maret 1996 terjadi?
2. Mengetahui keterkaitan radikalisasi di Buaran Pekalongan tersebut dengan dimensi-dimensi : (a). Sosial-keagamaan ; (b) Sosial-budaya, (c), sosial-ekonomi, dan (d) aspek kesejarahan kota Pekalongan.

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan dua harapan, yakni :

1. *Secara teoritis*, diharapkan dari penelitian ini dapat memperkaya wacana tentang berbagai kasus kerusuhan dan radikalisasi massa yang belakangan ini terjadi, lebih-lebih jangkauan penelitian ini dapat menjawab dan menambah pengkayaan teori-teori radikalisme massa

yang sudah lama ada dengan pembahasan yang sifat lingkungannya lebih kecil.

2. *Secara Aplikatif*, diharapkan dari hasil temuan penelitian ini hadir inspirasi-inspirasi alternatif rekomendasi yang dapat disumbangkan bagi pihak-pihak yang berkompeten dalam urusan-urusan Pekalongan seperti Pemerintah, khususnya Pemda tingkat I Jawa Tengah dan Kodya tk. II Pekalongan, sehingga "siklus" kerusuhan yang terjadi Pekalongan dalam jangka panjang dapat diatasi sekaligus dapat diantisipasi.

D. METODE PENELITIAN

Dalam upaya memperoleh jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam tipe ini, penelitian dilaksanakan dalam suasana yang alamiah sehingga diharapkan hasilnya akan bersifat objektif, mampu mendeskripsikan keadaan seperti yang terjadi sesungguhnya (Nasution, 1988 : 9).

Sedangkan untuk mendapatkan ketepatan dan akurasi yang tinggi serta mempertimbangkan metode penelitian, maka analisis telah dilakukan secara induktif-kuantitatif (Moloeng, 1989 : 6).

1. Tipe Penelitian.

Penelitian pada dasarnya bersifat penjajakan atau eksploratif, yaitu suatu penelitian yang bersifat terbuka, masih mencari-cari dan belum memiliki hipotesis (Singarimbun, 1983 : 3). Dari segi pengumpulan data, penelitian ini merupakan suatu penelitian lapangan (*field*

research) yang dilakukan dengan cara mengamati gejala sosial yang diteliti, berusaha memahami gejala-gejala yang tidak dapat diramalkan sebelumnya dan mengembangkannya dalam suatu kesimpulan (*conclusion*), yakni suatu kesimpulan umum yang mendorong studi lebih lanjut yang lebih mendalam dan akurat.

2. *Instrumen Penelitian.*

Ada beberapa instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian kualitatif ini, yaitu : *Pertama*, anggota tim penelitian itu sendiri yang akan melakukan wawancara tidak terstruktur hingga wawancara bebas secara langsung terhadap pihak-pihak yang secara legal terkait maupun tokoh-tokoh yang memiliki kompetensi tinggi terhadap persoalan kerusuhan di Buaran Pekalongan tersebut, termasuk di dalamnya adalah pendapat netral yang akan diperoleh dari para pengamat ; *Kedua*, penelitian ini juga menggunakan alat-alat tulis dan tape recorder yang berfungsi menyerap informasi yang akan diperoleh.

3. *Metode Pemilihan Informan.*

Pemilihan informan dalam rangka pengumpulan data dan informasi sebanyak-banyaknya didasarkan pada kriteria seperti kesediaan untuk menerima penelitian dan memberikan informasi secara bebas dan jujur, memiliki pemahaman atau pengetahuan mengenai permasalahan penelitian dengan baik dan tidak semata-mata berdasarkan rumor, serta formal maupun informal memiliki kepentingan dan tanggung jawab atas persoalan yang terjadi. Jumlah dan pilihan ditentukan

dengan menggunakan prinsip *snow balling* dimulai dari informan yang dapat membuka jalan bagi informasi berikutnya.

4. *Teknik Pengumpulan Data.*

Data dalam penelitian ini dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu data primer, yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi ; serta data sekunder yang diperoleh melalui kajian dokumentasi. Pilihan terhadap teknik pengumpulan data seperti itu selain terkait dengan tipe penelitian yang telah disebutkan di atas, juga telah dihasilkannya suatu data yang sifatnya kualitatif.

5. *Analisis Data.*

Ada tiga langkah umum yang telah dilaksanakan dalam upaya menganalisis data-data yang telah berhasil dikumpulkan (Miles and Huberman, 1992 : 16-21). *Pertama*, reduksi data. Artinya, semua informasi yang berkaitan dengan kerusuhan di Buaran, termasuk di dalamnya proses sosial yang melingkupinya, telah diteliti dan dikaji, dengan terfokus sesuai dengan tujuan penelitian dimaksud ; *Kedua*, penyajian data. Tahap ini telah diusahakan menampilkan eksplanasi dan informasi tentang faktor-faktor kunci pemicu kerusuhan sehingga pada perkembangannya proses sosial yang terjadi di Buaran dan Pekalongan pada umumnya mendorong terjadinya kerusuhan ; *ketiga*, penarikan kesimpulan. Dalam tahap ini disampaikan hasil akhir dari keseluruhan informasi yang telah terkumpul dan menarik benang merah faktor-faktor pemicu kerusuhan, lingkungan permasalahan, latar belakang

sosio-kultural masyarakat Pekalongan, hingga proses sosial yang berkembang sehingga kesemuanya itu telah dapat meletupkan kerusuhan politik dalam suatu aksi massa yang radikal pada sekitar bulan Maret 1997.